

MOTIVASI INDONESIA MENERAPKAN REGULASI SNI TERHADAP MAINAN IMPOR

STUDI KASUS: PRODUK MAINAN IMPOR DARI CINA

Oleh:

Alpina Yuliandita,¹

Alpina_yuliandita@ymail.com

Pembimbing: Fazli, S.IP, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/fax. 0761-63277**

Abstract

This research would explain about Indonesia Motivate to apply SNI Regulation for import's toys. This study used a qualitative descriptive method. The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) agreement is Indonesia's economy has improved or deteriorated. This study used a qualitative descriptive method. The results of this study is the ACFTA a positive impact on SMEs in Indonesia, because ACFTA growing number of SMEs in Indonesia.

A toy is an object which has close relationship whit child safety. As its primary consumer. Many accidents were happen to the children due to misused, not apply to the age concern. Since toys may create accident for the children, several countries has obliged their standards as a technical requirement for the product to comply if they want to be marketed in the country. Indonesia plans to implement the toys standards. The readiness of SNI was conducte throught analyzing the availibility of SNI compare to international reference. Standardization is one of the instruments of technical regulations that can protect the interests of consumers nationwide and as well as domestic producers. Through technical regulations based on standardization can be prevented circulation of goods that are not qualified in the domestic market, especially related to health, safety, security, and environment conservation. Through the same instrument, can be prevented the entry of imported goods of low quality which distort the domestic market because of low-priced.

The research shows that Indonesia took strategy to apply SNI of import's toy with preasure the import' toys use in regulation to be increas national product competition.

Keywords: *Motivation, toys, ACFTA, Import, technical regulations, mandatory SNI.*

* Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2010

PENDAHULUAN

Permintaan impor Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun hampir di semua kawasan perdagangan. Sejak tahun 1988, impor Indonesia berasal dari 55 negara di seluruh dunia. Secara rata-rata ada delapan negara impor yang memiliki kontribusi impor yang besar ke Indonesia yaitu Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Korea Selatan, Australia, Cina, dan Taiwan. Pada saat ini, perkembangan impor Indonesia menurut negara asal, kawasan ASEAN memiliki volume yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain. Dan penelitian ini memfokuskan pada impor Cina ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam *ASEAN - China Free Trade Area* (ACFTA).¹ Keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan ACFTA ditandai dengan ratifikasi Indonesia dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada tanggal 04 November 2002 di Pnom Penh, Kamboja, dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

Disepakatinya pasar bebas ASEAN dan Cina, memberi peluang negatif dan positif bagi Indonesia. Salah satu contoh positifnya adalah penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di Cina dan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia tersebut. Namun dari hal positif juga muncul peluang negatif bagi Indonesia sendiri, dimana hal tersebut membuat pasar domestik di Indonesia menjadi sangat tidak berimbang. Dan bahkan produk mainan anak buatan Cina juga telah menguasai produksi mainan di pasar Indonesia, dimana banyak label merk Cina

telah bersaing dengan produk lokal maupun negara pemasok lainnya. Pihak industri telah lama menempatkan anak sebagai target pasar berbagai produk, salah satunya mainan anak. Dengan populasi anak usia 0-14 tahun sebesar 28,9 persen dari total penduduknya, Indonesia merupakan pasar mainan yang cukup besar dan potensial.

Dari data Kementrian Perdagangan, setiap tahun nilai impor mainan anak di Indonesia mencapai 75 juta dollar AS dimana lebih dari 90 persen berasal dari Cina. Kebanyakan mainan Cina yang berharga murah menguasai pasar-pasar tradisional. Sementara produk mainan impor dari Eropa dan Amerika Serikat yang harganya lebih mahal dijual di toko modern. Pada tahun 2010 pasar mainan anak dunia mencapai US\$ 83,3 miliar. sedangkan pasar mainan anak di Asia mengalami peningkatan rata-rata 9,2%.² Di samping harga yang relatif sangat murah, tidak dapat dipungkiri produk buatan Cina memang terlihat lebih atraktif dan dinamis. Untuk *soft toys* seperti boneka misalnya, mereka membenamkan *chip* yang mampu menghasilkan gerak dan bunyi. Karena itu mainan ini sering dijumpai diberbagai tempat mulai dari toko mainan, pinggir toko, pasar tradisional, di pinggir-pinggir jalan, dan toko toserba (toko serba ada).

Namun, tidak semua mainan impor tersebut yang memenuhi standar keamanan. Banyak ditemukan mainan impor yang mengandung zat kimia berbahaya dan tidak aman bagi anak-anak, ditambah lagi kemasan mainan impor yang menggunakan bahasa Cina yang mayoritas tidak bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi

² Badan Pusat Statistik. (2010). *Data Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta.

Nasional.³ Untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia terkait keamanan dan kualitas permainan mereka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Adapun aturan tersebut dikeluarkan pemerintah pada 11 November 2013 dan akan diberlakukan 30 April 2014.

LANDASAN TEORITIS

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, teori yang dipakai oleh penulis untuk membahas penelitian ini adalah Teori Regulasi.

1. Teori Regulasi

Teori Regulasi lahir di akhir tahun 1970-an, pada masa itu situasi ekonomi dunia sedang dilanda resesi, setelah mengalami masa kejayaan sekitar 20-30 tahun. Pada masa tersebut, perekonomian Eropa dan Amerika tengah memasuki masa paling sulit sejak krisis hebat di Amerika tahun 1930-an. Resesi tahun 1970 bercirikan tingginya tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran. Periode tersebut sering disebut sebagai masa “*stagflation*”, di mana stagnasi ekonomi dialami bersamaan dengan tingginya inflasi.

Dengan adanya hal tersebut membuat para pemikir Prancis yang tergabung dalam aliran Teori Regulasi mencoba mencari akar masalah dari sisi yang lain. Istilah regulasi sendiri berasal dari *Gerard De Bernis* yang mengambilnya dari konsep biologi dan kemudian diterapkan dalam analisis ekonomi. Regulation dalam arti harfiahnya adalah *regularities*.⁴ Dalam pengertian ini,

sistem ekonomi dibentuk oleh “regularities” dari berbagai institusi yang menentukan ritme atau sistem tertentu. Sistem kapitalisme, meskipun diwarnai dengan berbagai kontradiksi (ide Marxist) tetap ada sebuah keteraturan yang bertahan serta membuat sistem tersebut tetap hidup. Meski begitu, bentuk keteraturan tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga yang dinamakan sebagai regulasi (*regularities*) juga mengalami perubahan. Perubahan model keteraturan (*mode of regulation*) inilah yang menjadi fokus perhatian Teori Regulasi.

Regulasi berfungsi untuk mengatur distorsi dan kontradiksi yang muncul akibat adanya kompetisi dan akumulasi kapital. Regulasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur distorsi dan kontradiksi agar sesuai dan dapat disesuaikan dengan situasi sosial. Dan dengan berjalan efektifnya regulasi ini maka akan merangsang pertumbuhan di masing - masing negara.⁵

Dunford mengatakan mengenai adanya kompetisi. Sejatinya kompetisi merupakan hal naluriah yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Hal ini bahkan telah diungkapkan baik oleh dua tokoh yang mempunyai aliran yang berbeda.⁶ Tokoh pertama adalah *Thomas Hobbes* yang merupakan tokoh realisme sejati. Hobbes mengatakan bahwasanya sifat naluriah manusia adalah seperti binatang yang bisa saling “memakan” satu sama lain. Karena itu manusia secara naluriah terlahir egois dan senantiasa mengutamakan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dapat berupa kekuatan, image dan prestis, serta kedudukan yang tinggi. Dan untuk mendapatkan semua itu manusia akan melakukan cara apapun. Sedangkan menurut *John Locke* yang merupakan

³Peraturan Perundang-undangan: Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Indonesia, PP No.15 Tahun 1991.

⁴ http://vita_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-79581-Ekonomi%20Politik%20Internasional-

Teori%20Regulasi:%20Jawaban%20Atas%20Dua%20Si si%20Kapitalisme%20dan%20Globalisasi.html

⁵ Dunford, Michael. 2000. “Globalization and Theories of Regulation”, dalam Ronen Palan (ed.), *Global Political Economy: Contemporary Theories*, London: Routledge, pp. 143-167.

⁶ *Ibid*

tokoh pemikiran liberalisme mengatakan bahwa manusia lahir dalam sebuah persamaan namun hal ini dapat berubah karena manusia memiliki “hak kepemilikan” terhadap sesuatu. “hak kepemilikan” ini akan menggeser persamaan pada sebuah rasa kompetisi karena tercipta sebuah kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki.

Teori Regulasi berpandangan bahwa ekonomi harus dibangun dalam sebuah konteks relasi sosial tertentu. Dan yang harus disadari bahwa pemikiran ekonomi juga tidak pernah lepas dari konteks historis dan konteks ekonomi-politik negara di mana dia berkembang. Demikian juga tentang konsep pembangunan, mekanisme ekonomi, hubungan antar-institusi dan juga interaksi sosial pada umumnya, tidak pernah terlepas dari konteks waktu dan tempat nya. Ada beberapa pemikiran yang mempengaruhi Teori Regulasi seperti Marxisme, Annales dan habitus.⁷ Ekonomi harus dilihat dalam keterkaitan historis dan strukturalnya. Selain itu, ekonomi bukan semata-mata menyangkut pilihan rasional (*rational choice*), prinsip maksimalisasi (*pareto optimum*), biaya transaksi (*transaction cost*), melainkan juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat (*habitus*).

Pada dasarnya, Teori Regulasi menawarkan “lima model regulasi” yang terdiri dari⁸:

1. Relasi kapital- perburuhan,
2. Bentuk kompetisi,
3. Sistem moneter,
4. Model negara dan,
5. Regim internasional.

⁷ Trebilcock, Michael J dan Robert Howse, The Regulation of International Trade, 3rd Ed, London: Routledge, 2005.

⁸ *Ibid*

Berdasar pada 5 Model dari regulasi ini, dapat dipahami bahwa teori Regulasi mengajarkan bahwa ekonomi adalah bagian dari relasi sosial yang terikat dalam konteks sejarah sebuah bangsa. Jadi memformulasikan berbagai masalah, sekaligus menemukan pemecahannya merupakan tugas utama bagi masyarakat warga bangsa tersebut. Disinilah relevansi yang paling mendasar untuk memahami dan kemudian membumikan pemikiran Teori Regulasi ini.

Berdasarkan pemikiran Teori Regulasi diatas maka Dalam hal ini Indonesia mencari jalan keluar yang dapat mengatasi permasalahan pasar dengan membuat suatu kebijakan yang berupa penerapan SNI untuk mengatur serta mengendalikan masuknya barang impor Cina. Sehingga barang impor yang beredar di Indonesia menjadi terjamin kualitas produknya. Dan selain itu, pada dasarnya setiap negara berkompetisi dalam mencapai suatu perekonomian yang lebih maju, dan Indonesia menerapkan Regulasi SNI untuk kepentingan ekonomi Indonesia sendiri sehingga kedepannya mampu untuk bersaing dengan negara lain.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Cina memperluas pasar produk-produk mereka ke negara-negara lain termasuk Indonesia, karena negara-negara tujuan ekspor seperti AS, Jepang, dan Eropa mengalami penurunan, ditambah lagi pasar ekspor utama Cina Amerika Serikat dan Eropa yang menetapkan peraturan ketat dan standar untuk kualitas dan keamanan produk mainan. Uni Eropa membuat efektif sebuah direktif baru (2009/48/EC) berkaitan dengan keselamatan mainan, Amerika Serikat juga mengadopsi program sertifikasi keselamatan mainan. Produk-produk Cina yang diekspor ke Indonesia seperti sepatu, baju, barang industri rumah tangga, elektronik dan mainan plastik mendapat respon pelaku pasar lokal karena harganya

lebih murah dibandingkan dengan produk asal Indonesia.⁹ Cina memfokuskan diri terhadap pasar Asia khususnya Indonesia, karena ekonominya yang terus tumbuh. Indonesia dinilai merupakan pasar potensial bagi produk Cina selain jumlah penduduknya yang besar juga ekonominya dari tahun ke tahun terus meningkat. Ekonomi Indonesia cukup positif, namun pertumbuhan yang terus membaik belum memenuhi sasaran seperti peningkatan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Ditambah dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih mencari barang murah, maka secara perlahan pasar produk lokal disaingi oleh produk Cina.

Cina dan Indonesia kaya akan sumber daya. Namun, dalam hal teknologi dan biaya tenaga kerja Indonesia tertinggal. Misalnya dalam hal teknologi tekstil masih menggunakan barang teknologi yang lama atau tidak layak dipakai lagi. Sementara itu dari segi tenaga kerja di Indonesia pada saat ini mengalami tekanan kuat dari serikat pekerja untuk meningkatkan gaji. Sehingga banyak pabrik-pabrik yang tutup dan mulai memindahkan investasi dari Indonesia. Berbeda dengan Cina yang memiliki keunggulan kompetitif dari segi tenaga kerja yang murah dan produktif yang merupakan sumber utama pertumbuhan.¹⁰

Fenomena inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti permasalahan ini karena keprihatinan oleh gencarnya produk Cina yang mengancam industri dan perdagangan mainan anak lokal. Bagaimanakah keberlangsungan mainan anak dalam negeri jika masalah ini tidak segera diatasi dan diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah dan orang-orang yang bergerak dalam bidang tersebut. Tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan

konsumen dan mempunyai peran yang besar dalam penentuan kelangsungan produsen mainan anak Indonesia kedepannya.

A.Perkembangan Industri Mainan Anak di Indonesia

Sejak awal tahun 1990-an, industri mainan Indonesia telah berkembang hingga mencapai 120 perusahaan, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI). Sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut berada di daerah Jakarta dan Jawa Barat karena didukung tenaga kerja terlatih serta ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti transportasi dan komunikasi yang baik. Sebagai usaha untuk mewujudkan keunggulan di pasar global maka industri mainan produk leih bermutu dengan spesifikasi yang lebih banyak.

Kinerja industri mainan sebelum krisis moneter cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai ekspor dan pertumbuhan setiap tahunnya. Nilai ekspor pada tahun 1996 adalah 104,8 juta dollar AS dengan laju pertumbuhan sebesar 60% sejak tahun 1986. Pada tahun 1997, nilai ekspor telah mencapai 166 juta dollar AS. Dan tahun 1998 di targetkan naik 20% sehingga nilainya mencapai 180 juta dollar AS.¹¹ Pertumbuhan yang terus meningkat disebabkan peningkatan permintaan pasar dunia, khususnya dari negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Ekspor mainan ke Amerika Serikat mencapai 3,4 ribu ton sekitar 22,17 juta dollar AS. Peringkat kedua negara tujuan ekspor mainan ditempati oleh Singapura dengan volume 3,24 ribu ton tetapi dengan nilai yang lebih besar daripada Amerika Serikat, yaitu 105,86 juta dollar AS.

⁹<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.Bombardir.Indonesia..Apa.Kabar.Pruduk.Lokal diakses tanggal 29 Januari 2014>

¹⁰ *Ibid*

¹¹

<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=10381,Loc.cit>

B.Perkembangan Konsumsi Mainan Anak di Indonesia

Seiring perkembangan zaman, industri mainan anak sangat tergantung pada tren yang berubah-ubah, sehingga banyak anak pada usia muda lebih cepat mengenal mainan berbasis teknologi. Banyak dari anak-anak bergerak menjauh dari mainan tradisional dan beralih terhadap mainan yang di anggap “mainan dewasa” termasuk video game dan barang-barang elektronik lainnya. Mainan yang di anggap sebagai mainan dewasa kini anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas dapat menggunakan mainan tersebut. Seperti mainan Video game, mainan yang menggunakan komputer, mainan yang menggunakan remot kontrol dan mainan elektronik lainnya. Mainan elektronik ini dikategorikan sebagai mainan kelas tinggi, dioperasikan secara mekanik dan memiliki kualitas unggul. Mainan ini merupakan mainan mahal dan dijual di *department store/ Mall*. Target pelanggan berpenghasilan tinggi, pembeli lebih memilih kualitas barang. Terdiri dari beragam mainan seperti video game, mainan komputer, *playstation* (PS), dan mainan kualitas unggul lainnya. Untuk Indonesia sendiri mainan elektronik ini tidak memiliki pangsa pasar yang tinggi karena jumlah penduduk Indonesia sebagian besar berpenghasilan menengah, sehingga untuk membeli mainan elektronik orang tua yang berpenghasilan sedikit tidak sanggup, karena mainan elektronik ini dapat dikategorikan sebagai mainan mahal yang berkualitas unggul.

Mainan anak asal Cina di pasar Indonesia lebih banyak dibanjiri oleh mainan yang berkualitas rendah yang terbuat dari plastik dan karet yang tipis sehingga memungkinkan gampang rusak apabila dilempar atau terjatuh. Karena itu mainan ini sering dijumpai dengan harga yang murah, kebanyakan mainan kualitas rendah ini tidak terdapat spesifikasi atau daftar bahan pembuatan dan dapat digunakan sekali pakai saja karena apabila

rusak jarang bisa dipergunakan kembali. Mainan-mainan berkualitas rendah ini banyak ditemui diberbagai tempat mulai dari toko mainan, pinggiran toko, simpang lampu merah, pasar tradisional, dipinggir-pinggir jalan, dan toserba (toko serba ada).

C.Masuknya Mainan Impor Cina ke Indonesia

Masuknya produk mainan impor dari Cina yang sekarang ini marak mengisi pasar-pasar modern dan tradisional membuat resah banyak pedagang, pekerja serta pengrajin mainan anak Indonesia. Masuknya mainan impor Cina di Indonesia yang berharga murah tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan ACFTA tahun 2010. Pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) 2010 mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.¹² ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas, Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Masuknya barang-barang tersebut ke Indonesia dilakukan melalui impor legal dan impor ilegal.

Pada Tabel 1.2 berikut disajikan ekspor-impor Indonesia dengan negara-negara tersebut:

¹² Nugraha, Andri Gilang. Op.Cit., hal 5

Tabel 1.2
Ekspor-Import Indonesia ke Negara lain

Negara	Ekspor Nasional			Import Nasional		
	Januari 2009	Desember 2009	Januari 2010	Januari 2009	Desember 2009	Januari 2010
Cina	462,9	1206,8	1011,7	1035,7	1482,6	1408,1
Singapura	580,7	713,8	701,5	651,5	784,9	784,2
Malaysia	281,7	730,3	600,4	292,6	298,2	330,8
Thailand	147,9	274,3	288,6	291,1	466,6	482,7
Anggota ASEAN Lainnya	252,5	436,2	367,2	51,7	136,0	102,6
Total	7280,1	13348,1	11574,7	6609,6	10299,9	9543,3

Sumber: BPS, dalam *Bisnis Indonesia*, Selasa, 2 Maret 2010

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa impor Cina ke Indonesia lebih besar dari ekspornya, sehingga terjadi defisit perdagangan. Tanpa pemberlakuan ACFTA impor Cina ke Indonesia sudah cukup tinggi, apalagi dengan dihapuskannya tarif bea masuk barang Cina ke Indonesia. Indonesia memang masih jauh tertinggal dari Cina. Saat ini industri mainan Indonesia tengah menghadapi potensi besar mengalami kepunahan karena sudah mengalami persaingan internasional. Arus pasokan mainan impor terus menekan omzet industri mainan nasional. Diperkirakan setidaknya 80% mainan yang dijual di Indonesia saat ini merupakan komoditas impor.

Dengan tantangan tersebut, pemerintah mempertegas bahwa industri mainan nasional perlu memperbaiki kualitas konseptualisasi produk yang dihasilkannya. Selain mencuatkan karakter budaya, alam, dan semangat iptek Indonesia, langkah pematangan ide produk tersebut perlu dilengkapi dengan upaya menyiapkan mainan yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

D. Perkembangan Penerapan Standar dan Penilaian

Mengamati kenyataan dan kecenderungan bahwa perkembangan

perdagangan pada umumnya dan perdagangan internasional khususnya telah menghasilkan berbagai macam barang yang diperdagangkan di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran suatu negara merupakan suatu keharusan yang perlu diperhatikan dalam konteks globalisasi perdagangan yang berkembang saat ini. Walaupun demikian, globalisasi dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif dan sekaligus memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar internasional maupun domestik.

Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya baik dari segi kualitas produk maupun daya saing harga melalui efisiensi produksi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pilihan barang kebutuhan yang tersedia bagi konsumen dengan kualitas dan harga yang bersaing.¹³ Meskipun demikian, di sisi lain banyak beredar barang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan standar maupun ketentuan ekspor-impor karena harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis, sehingga dapat merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemberlakuan standar secara wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari hambatan persaingan yang sehat, hambatan inovasi, dan hambatan pengembangan UKM. Dalam kerangka ACFTA, untuk ke-20 sektor industri, tercatat terdapat 2.058 Standar Nasional

13

http://m.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5276/Indonesia-Tingkatkan-Partisipasi-dan-Kepemimpinan-dalam-kegiatan-Codex#.U-r9bmNtbRw

Indonesia (SNI) atau sekitar 30% dari total 6.839 SNI yang telah ditetapkan BSN. SNI terbanyak ada pada sektor Makanan dan Minuman (440 SNI), Mesin dan Perkakas (156 SNI), Tekstil dan Produk Tekstil (266 SNI), Plastik (79 SNI), Elektronik dan Kelistrikan (159 SNI), Benang dan Kain (142 SNI), Alat Kesehatan (133 SNI), Hortikultura (113 SNI), Pertanian dan Industri Hasil Pertanian (121 SNI), Petrokimia Hulu (108 SNI), Aluminium (49 SNI), Alas Kaki (47 SNI), Baja Hilir (141 SNI), Furnitur (30 SNI), Kosmetik (30 SNI), Ban (15 SNI), Serat Sintesis (14 SNI), Pengelolaan Kakao (10 SNI), Mainan Anak (4 SNI) dan Kaca Lembaran (1 SNI).¹⁴ Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung dengan infrastruktur mutu yang memadai.

Pengawasan SNI wajib terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam negeri dilakukan melalui pengawasan pra-pasar dan pengawasan di pasar. Untuk memudahkan pengawasan baik pra-pasar maupun di pasar dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di dalam negeri dan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang di dalamnya ada Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk barang Impor.

Pengawasan sebagai bagian dari penerapan standar didukung melalui kegiatan penilaian kesesuaian yang bergantung kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian Sertifikasi, Laboratorium penguji, dan Lembaga Inspeksi. Pada tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, yang

mengatur pengawasan pra pasar dan di pasar untuk produk SNI yang diberlakukan secara wajib, serta LPK yang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) terhadap barang yang diberlakukan SNI secara wajib.¹⁵

E. Pemberlakuan SNI untuk melindungi anak Indonesia

Pemberlakuan secara wajib SNI Mainan Anak, mulai efektif per 30 April 2014. Meskipun semangat dari pemberlakuan SNI ini adalah untuk melindungi anak-anak dari masalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan, masih banyak pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pustakawan BSN Sri Rahayu Safitri menuturkan pentingnya SNI Mainan Anak diberlakukan wajib. Tahun 2011, BSN diundang oleh pihak Kementerian Perdagangan yang membahas mengenai beberapa peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh mainan anak. Seperti kasus cedera mata karena disebabkan senjata mainan. Juga kelereng yang sedianya adalah hadiah produk snack tertentu namun karena langsung tercampur dalam satu kemasan, anak tidak tersadar menelan kelereng tersebut.¹⁶

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut, maka per tanggal 30 April 2014, produk mainan anak dalam dan luar negeri yang beredar di wilayah Indonesia harus bertanda SNI. Ini artinya, selama kurun waktu 1 tahun sejak tahun 2013, telah dilakukan proses notifikasi ke WTO maupun sosialisasi ke pihak industri untuk mempersiapkan diri menyambut pemberlakuan efektif SNI Mainan Anak secara wajib.

¹⁴ Maule, A., 1996. Some Implications of AFTA for Thailand: A Revealed Comparative Advantage Approach, *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 13 (Juli), No. 1, hal. 14-38.

¹⁵ Peraturan Perundang-undangan: *Op.Cit*

¹⁶ http://www.bsn.or.id/main/berita/berita_det/5154/Pemberlakuan-SNI-Mainan-Anak--lindungi-Anak-Indonesia-#.U-r9ymNtbRw

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Prof. Bambang Prasetya mengatakan, semangat dari pemberlakuan secara wajib SNI tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya penggunaan mainan anak yang tak terjamin mutu atau keselamatannya. Apalagi, produk mainan anak yang berbahan baku plastik kebanyakan impor yang tentu saja bisa mengandung bahan berbahaya seperti logam berat, atau hasil daur ulang.¹⁷

Kecemasan sebagian pihak bahwa industri atau UKM akan terkena imbas negatif dari pemberlakuan SNI wajib tersebut, Prof. Bambang mengatakan bahwa justru dengan pemberlakuan secara wajib SNI ini akan mendorong industri mainan dalam negeri semakin berkembang dan bersaing. Menurut Sri Rahayu, industri mainan anak lokal kebanyakan berbahan baku dari kayu. Sementara itu, Indonesia menguasai pangsa pasar kayu dunia.

Dengan kebijakan dari pemerintah tersebut, maka industri mainan anak dalam negeri, berpeluang mengembangkan mainan anak yang aman dan kompetitif dengan produk impor. Selain itu, juga berpeluang untuk mengembangkan mainan yang bisa dimodifikasi bahan kayu dengan plastik. Prof. Bambang mengingatkan, industri mainan anak harus siap berkompetisi dengan produk luar negeri di era perdagangan bebas ini. Jika tidak siap, maka justru industri mainan anak lokal akan tersingkir dan produk mainan impor, merajai pasar Indonesia.¹⁸ Dengan pemberlakuan secara wajib SNI Mainan Anak, produk impor “terpaksa” menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, dan situasi ini seharusnya dapat segera dimanfaatkan oleh industri lokal.

F.Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Ekspor nasional selama periode 2005 - 2008 mengalami peningkatan, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor. Namun saat ini produk ekspor nasional masih didominasi oleh 10 produk utama yang terdiri dari TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Konsentrasi ekspor terhadap 10 produk tersebut cenderung menurun, yaitu 45 persen pada tahun 2004 menjadi 40 persen pada tahun 2008.¹⁹

G.Jaminan Kualitas Produk Mainan Anak

Untuk menguji kelayakan dari sebuah produk mainan maka dilakukan pengujian kualitas produk. Pembelian sampel dilakukan secara random di 5 wilayah DKI Jakarta. Sampel mainan ini dibeli di pasar mainan (Gembrong/Prumpung), swalayan, ITC, maupun toko buku. Jumlah sampel sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis dengan berbagai warna yang bervariasi. YLKI memilih laboratorium Afiliasi Kimia Universitas Indonesia untuk menguji sejumlah sampel tersebut.²⁰ Sedangkan hal-hal yang diujikan meliputi; kandungan logam berat dalam cat yang digunakan untuk mainan edukasi. Beberapa logam yang diuji, antara lain; Pb (timbal), Hg (merkuri), Cd (Cadmium) dan Cr (Cromium). Selain pengujian laboratorium, dilakukan juga analisa label pada produk yang diuji untuk label pada kemasan dan pengamatan secara kasat mata untuk tampilan fisik dari mainan edukasi ini, seperti cat yang berbau

¹⁹

http://www.depdag.go.id/files/publikasi/pub_cetak/catata_npln/files/200810.pdf

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

²⁰ Ibid., Noor Jehan, 2012. Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

menyengat dan berwarna mencolok, cat yang mudah terkelupas.

A. Profil Laboratorium Uji

Laboratorium Uji harus memiliki personel yang kompeten untuk melaksanakan pengujian produk dalam ruang lingkupnya yang dipayungi skema akreditasi dan telah memenuhi persyaratan internasional. Akreditasi laboratorium diberikan oleh KAN pada laboratorium yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan metode uji yang dipilih dan membuktikan kemampuannya sesuai dengan persyaratan dalam SNI 19-17025-2000 (ISO/ IEC17025-2005) *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi*.²¹ Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik suatu produk, material, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Metode pengujian memiliki arti penting dalam kegiatan pengujian. Akreditasi laboratorium ditujukan untuk memberi kepercayaan terhadap jasa yang dihasilkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur uji yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Profil laboratorium uji pada regulasi teknis mengacu pada skema penunjukan yang digunakan pada masing-masing regulasi teknis yang mendukung pemberlakuan penerapan SNI Wajib. Hal ini terkait dengan skema sertifikasi produk yang digunakan oleh seluruh LSPro yang menggunakan hasil pengujian sampel yang valid sebagai acuan determinasi kesesuaian sertifikasi produk SNI masing-masing.

²¹ Surveyor Indonesia. 2009. Laporan Agrega Hasil Survey dan Verifikasi dalam rangka I ntensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Industri asional. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

B. Analisa Label Produk Mainan Anak

Selain uji laboratorium, YLKI juga melakukan analisa label terhadap ke-21 sampel. Analisa label ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha memberikan informasi yang memadai bagi konsumennya. Hal ini selaras dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur; berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Secara spesifik, pencantuman label tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.²² Adapun hal-hal yang wajib tercantum dalam kemasan diantaranya; nama atau merek barang, nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor, spesifikasi barang, keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang, simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas serta negara pembuat atau *Made in*.

Dari hasil uji laboratorium, analisa label dan pengamatan fisik, YLKI merekomendasikan kepada²³:

1. Pemerintah. Untuk membuat SNI wajib terhadap mainan anak, membuat regulasi yang mewajibkan semua mainan anak menyantumkan label berbahasa Indonesia yang meliputi cara penggunaan, usia, dan peringatan. Memberikan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada produsen mainan anak sehingga dapat bersaing dengan

²² Ibid

²³ Noor Jehan, 2012. Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). *Op Cit*

mainan produk impor. Serta pemerintah wajib melakukan pengawasan untuk semua produk yang beredar di Indonesia, dan *law enforcement*.

2. Produsen atau Importir. Mendorong kepada produsen atau importir untuk memproduksi dan mengimpor mainan anak sesuai standar keamanan. Produsen atau Importir wajib menyediakan informasi yang jelas, jujur dan lengkap terkait produk mainan, serta menyediakan layanan konsumen.
3. Konsumen. Agar lebih jeli dalam membeli mainan anak, jangan mudah terpancing dengan harga yang murah, memilih mainan sesuai dengan usia anak, tidak terpengaruh oleh iklan, membiasakan membaca label serta mengedukasi anak-anak untuk mencuci tangan setelah bermain.

KESIMPULAN

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

Menurut penulis yang menjadi permasalahan sekarang adalah masih banyak pelaku UKM di Indonesia yang kemudian belum kuat berkompetisi di pasar bebas. Hal tersebut perlu segera diatasi dengan memperkuat kelembagaan dan komunitas masing-masing dalam meningkatkan daya saing dan perkuatan

pasar dalam negeri. Kondisi tersebut merupakan salah satu kelemahan yang perlu segera dibenahi dan pemasaran produk saat ini tidak bisa dilakukan secara sektoral atau per individu melainkan perlu ada penguatan komunitas pelaku UKM agar daya saing produk dalam negeri makin meningkat. Meskipun banyak barang-barang dari luar negeri yang dan mempengaruhi jumlah penjualan pada produk UKM dari dalam negeri, produk UKM masih bisa bersaing karena produk UKM memiliki kualitas tidak kalah dengan produk luar negeri dan produk-produk UKM-pun juga banyak diminati tidak hanya di dalam negeri. Produk-produk UKM juga diminati di luar negeri.

Kekayaan alam dan luasnya produk iptek nasional sebenarnya menyediakan potensi inspirasi besar bagi kalangan industri untuk mengolah ide produk mainan unik yang disukai pasar nasional dan mancanegara. Nilai inovasi dalam desain mainan akan bertambah bila dilakukan dengan cara menarik keterlibatan lebih banyak spesialis dalam bidang iptek.

Dengan adanya wajib SNI untuk industri mainan mulai April 2014, diharapkan mampu mendongkrak bisnis industri mainan di dalam negeri. Dampak secara pasar, mainan impor akan lebih aman, sehingga tidak sembarangan mainan impor bisa masuk ke Indonesia. Dan jika dipandang dari sisi bisnis, dengan adanya regulasi SNI menjadi peluang besar bagi para industri mainan lokal untuk memperluas pasar ekspor. Selain itu, Adanya SNI akan membuat harga naik, khususnya produk yang diimpor. Karena mereka yang biasanya menggunakan bahan baku limbah biji plastik harus mencari bahan baku yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asnawi, Sahlan.(2002).*Teori Motivasi: Dalam Pendekatan Psikologi Industri Dan Organisasi*.Jakarta: Studi Press

_____. (2007). *Teori Motivasi Dalam Pendekatan Psikologi Industri Dan Organisasi*. cetakan ketiga. Jakarta: Studia Press

Budiardjo. Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta. Gramedia pustaka lama. 2005. hal.56

Budiardjo, Miriam dan Tri Nuke Pudjiastuti. *Teori-teori politik dewasa ini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Burchill, Scott. et.all. 2008. *The Theories of International Relation*. New York: Palgrave Macmillan

Dunford, Michael. 2000. "Globalization and Theories of Regulation", dalam Ronen Palan (ed.), *Global Political Economy: Contemporary Theories*, London: Routledge, pp. 143-167.

Eddy Herjanto (Penyunting), 2009. *Standarisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri: Pandangan pemangku kepentingan*.

Griffiths Martin, dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York & London: Routledge

Maule, A., 1996. Some Implications of AFTA for Thailand: A Reveale Comparative Advantage Approach, ASEAN Departemen Perindustrian, BPPI.

Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan*

Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 54

Mutakin, Firman dan Aziza Rahmaniar Salam. 2009. Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) Bagi Perdagangan Indonesia. *Economic Review No. 218 Desember 2009 Nobel dan Mundell yang Kapabel*. Esai-Esai Nobel Ekonomi, Kompas, Jakarta: 2007. *Economic Bulletin*, Vol. 13 (Juli), No. 1, hal. 14-38.

Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: konsep, kontroversi, aplikasi* (hayana pujaatmaka, penerjemah). Jakarta: Perhallindo.

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat. Hal. 229-239

Sagir, Soeharsono. (1985, 10 Februari). *Motivasi dan Disiplin Karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi*. berita pasar kerja.

Trebilcock, Michael J dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, 3rd Ed, London: Routledge, 2005.

Vincent Wei-Cheng Wang. (2005). *The Logic of China-Asean FTA, Economic Statecraft of Peaceful Ascendancy, in China and Southeast Asia, Global Changes and Regional Challenges*. (hal.22). Singapore: ISA S.

Wiranta, Sukarna, (1996) *Dampak perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Badan Pusat Statistik. (2010). *Data Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta.

Iwandahnial., *Kapal Dari Cina Padati Tanjung Priok Setelah Actfa Berlaku*.
<http://iwandahnial.wordpress.com/2010/02/04/kapal-dari-cina-padati-tanjung-priok-setelah-actfa-berlaku/>. diakses Maret 2014, Pukul 11.00 WIB

Jumlah Pulau di Indonesia 'Berkurang'
4.042 Buah. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013. Diakses 06 Maret 2014

Noor Jehan, 2012. Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) "Amankah Mainan Anak Anda? (Dimuat di Majalah Warta Konsumen).

Nugraha, Andri Gilang. "Tantangan dan Peluang Serta Langkah – Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)." Buletin KPI edisi-02, KPI, 2010. Hal 2

Peraturan Perundang-undangan: Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Indonesia, PP No.15 Tahun 1991.

Pusat Standardisasi. 2010. Katalog SNI Bidang Industri 2009. Departemen Perindustrian.

Surveyor Indonesia. 2009. Laporan Agregasi Hasil Survey dan Verifikasi dalam rangka Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Industri Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Wayne M. Morrison., *Health and Safety Concerns Over U.S. Imports of Chinese Products An Overview*. Diakses pada
<http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA48605>
4. diakses tanggal 06 Maret 2014, Pukul 11.00 WIB

Situs:

Apa Kabar Produk Lokal di Akses melalui
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.Bombardir.Indonesia..> Pada tanggal 29 Januari 2014

Badan Standarisasi Nasional, *Perusahaan yang telah menerapkan SNI, baru 2006 perusahaan*, online diakses 12 Agustus 2014 (http://www.bsn.or.id/berita/detail_news.cfm?Newsid=28)

Cina Panik Mainan Anak wajib ber SNI
<http://www.kluget.com/industri/as-dan-china-panik-mainan-anak-wajib-ber-sni/4554-as-dan-china-panik-mainan-anak-wajib-ber-sni.html>

Cina dan AS pertanyakan Kebijakan Wajib SNI untuk mainan anak.
<http://finance.detik.com/read/2014/03/11/135954/2522202/1036/china-dan-as-pertanyakan-kebijakan-sni-wajib-untuk-mainan-anak>

[Http://www.publicspeakinghowto.com,loc.cit](http://www.publicspeakinghowto.com,loc.cit)
<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=10381,Loc.cit>

Indonesia Tingkatkan Partisipasi dan Kepemimpinan

http://m.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5276/Indonesia-Tingkatkan-Partisipasi-dan-Kepemimpinan-dalam-kegiatan-Codex#.U-r9bmNtbRw

Industri *Utama Cina*. Diakses melalui <http://www.klakogroup.com/en/china-invest-monthly-newsletter/chinas-major-industries> pada tanggal 11 Agustus 2014

Mainan Anak Kebanjiran Order [http://www.equator-news.com.Mainan](http://www.equator-news.com>Mainan) Edukatif Kebanjiran Order. Minggu , 16 Mei 2010. Diakses Sabtu 09 Agustus 2014

Majalah Gatra, *Tahun 2003 Ekonomi Cina Tumbuh 9,1 Persen*, online diakses 10 Agustus 2014 (<http://www.gatra.com/2004-07-11/artikel.php?pil=23&id=33174>)

Pemberlakuan SNI mainan anak untuk melindungi anak Indonesia. http://www.bsn.or.id/main/berita/berita_det/5154/Pemberlakuan-SNI-Mainan-Anak--lindungi-Anak-Indonesia-#.U-r9ymNtbRw

Pengertian Regulasi Di akses melalui <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2094305-pengertian-regulasi/> pada tanggal 20 mei 2014

Peraturan dan Regulasi di akses melalui <http://pyia.wordpress.com/tag/definisi-peraturan-dan-regulasi/> pada tanggal 11 Agustus 2014

Republika, *Naga yang Terus Menggeliat*, online diakses 10 Agustus 2014 (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=181155&kat)

Tabel Perkembangan Impor Mainan Anak Impor http://www.depdag.go.id/files/publikasi/pub_cetak/catatanpln/files/200810.pdf

Tak Lama Lagi semua mainan anak wajib SNI di Akses <http://industri.kontan.co.id/news/tak-lama-lagi-semua-mainan-anak-wajib-berlabel-sni>

Teori Regulasi: Jawaban atas dua sisi Kapitalisme dan Globalisasi, di akses melalui http://vita.rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-79581